

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang

Muhammad Ilham¹⁾, Kusminaini Armin²⁾, Dimas Pratama Putra^{3)*}

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi dan Universitas Tridinanti Palembang

¹⁾muhammadilhamuns55@gmail.com; ²⁾kusminaini_armin@univ-tridinanti.ac.id;

³⁾dimaspratamaputra@univ-tridinanti.ac.id

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of increasing VAT rates, tax literacy and financial literacy on potential value added tax (VAT) revenues. This research uses primary data by distributing questionnaires to 398 people in the Ilir Timur I sub-district, Palembang city. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. Data analysis was carried out using IBM SPSS Version 25 software. The results of this research indicate that the increase in VAT rates and tax literacy partially influence the potential for VAT revenue. However, partial financial literacy has no effect on potential VAT revenues. Together (simultaneously), these three variables have a significant influence on potential value added tax (VAT) revenues.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, dan Literasi Keuangan terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 398 Masyarakat yang berada di kecamatan Ilir Timur I kota Palembang. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, Analisis data yang dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dan literasi pajak secara parsial berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN. Namun literasi keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN. Secara bersama-sama (simultan), ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Kata kunci: Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Literasi Keuangan, Potensi Penerimaan PPN

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berkelanjutan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual (Kementerian PPN, 2019). Untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka pemerintah perlu dana yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN (Sjahril et al., 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat (Suryani, 2020). Didalam memaksimalkan anggaran negara salah satunya adalah tingkat pendapatan negara. Sumber pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia memiliki sumber pendapatan utama yang berasal dari pajak (Dewi et al., 2022).

Bagi pemerintah, perpajakan tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu faktor kebijakan yang mengatur proses

perekonomian. Penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya. Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palembang terkait penerimaan perpajakan selama tahun 2018-2022 di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini



Gambar 1. Pertumbuhan Pendapatan PPN dari Tahun 2018-2022

Sumber: *djpk.kemenkeu*, 2023

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berfluktuatif, Pada tahun 2018 Pendapatan PPN sebesar Rp. 537,3 Triliun Pada tahun 2019 Pendapatan PPN mengalami penurunan sebesar Rp. 531,6 Triliun, Pada tahun 2020 Pendapatan PPN mengalami penurunan sebesar Rp. 450,3 Triliun, Pada tahun 2021 Pendapatan PPN mengalami peningkatan sebesar Rp. 501,8 Triliun dan tahun 2022 Pendapatan PPN mengalami peningkatan sebesar Rp. 552,3 Triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang jumlah yang cukup tinggi dalam penerimaan perpajakan di Indonesia. Tercapainya target penerimaan pajak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, hal ini belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih ada wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajak yang menyebabkan tingkat realisasi cenderung masih rendah.

Menurut (Sustiyo & Hidayat, 2020) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kontributor dalam penerimaan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk ke dalam pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak yang ditanggung oleh konsumen terakhir. Kewajiban perpajakan akan muncul apabila terdapat transaksi penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak atau dikenal sebagai jual beli barang dan/atau jasa kena pajak. Ketika transaksi tersebut tidak terjadi maka tidak ada kewajiban perpajakan yang muncul. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh konsumen akhir dan penjual yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkannya.

Pemerintah pada tanggal 1 April 2022 menaikkan Tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% dan akan dinaikkan menjadi 11% dan pada tanggal 1 Januari 2025 tarifnya dinaikkan menjadi 12% melalui Undang-undang No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Fenomena yang terjadi masyarakat khususnya di daerah Iilir Timur I Kota Palembang dengan kenaikan tarif PPN 11% ini bisa berimbas pada kegiatan jual beli di masyarakat khususnya di kota Palembang, pendapatan masyarakat dan lain-lain.

Tarif pajak adalah persentase yang ditentukan sebagai dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang merupakan tanggung jawab bagi wajib pajak (Mardiasmo, 2019:13). Di Indonesia tarif pajak ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan sebab pemungutan pajak dilakukan menggunakan tarif pajak (Effendi & Sandra, 2022). Secara umum, meskipun tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terhutang, tapi tetap harus memperhatikan prinsip keadilan. Apabila

penetapan tarif pajak tidak dipertimbangkan dengan baik, tentu hal tersebut dapat menjadi masalah. Di beberapa negara banyak wajib pajak yang menghindari pajak karena tarif pajak yang dirasa terlalu tinggi (Wardani & Rahmawatiningsih, 2022).

Literasi Pajak adalah kemampuan dalam menulis, membaca, mengolah informasi dan pengetahuan terkait bidang tertentu untuk kecakapan hidup. Secara umum, literasi pajak merupakan kemampuan baik secara teori maupun praktik mengenai bidang perpajakan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Literasi pajak dapat dikhususkan ke dalam masing-masing jenis pajak, salah satunya yaitu PPN. Oleh karena itu, literasi PPN merupakan pengetahuan dan keterampilan seseorang terkait PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak bergantung kepada subjek yang terdapat dalam suatu transaksi, tidak peduli apakah subjeknya Orang Pribadi, Badan, Pemerintah, bahkan memiliki NPWP atau tidak. PPN akan dikenakan atas objek dalam suatu transaksi, sehingga dapat dikatakan bahwa PPN merupakan salah satu jenis pajak objektif. Undang-Undang yang mengatur mengenai PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dimana mengalami perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Fenomenanya didalam masyarakat kecamatan Iilir Timur 1 Kota Palembang adalah kurangnya pemahaman literasi pajak serta tata cara yang harus dilakukan ketika menjadi wajib pajak. Sebagai contohnya wajib pajak masih sering menunggu ditagih baru mau membayar pajak, serta ada pula wajib pajak yang belum memahami mengenai pelaporan pajak setiap masa maupun setiap tahunnya. Sama halnya dengan masyarakat atau wajib pajak yang berada didaerah Kecamatan Iilir Timur I, masyarakat yang ada disana juga belum paham mengenai perpajakan yang ada dan masyarakat masih belum mengerti tentang pajak yang di pungut oleh pajak pusat dan pajak yang di pungut oleh pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Literasi keuangan dijelaskan di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Pengetahuan Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, dimana literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka saat

membuat keputusan tentang pengelolaan keuangan pribadinya untuk membantu mereka hidup lebih baik. Survey yang dilakukan oleh OJK hanya sebesar 49,68% penduduk Indonesia yang menerapkan literasi keuangan. Oleh karena itu, literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan keputusan yang berkualitas serta membentuk sikap dan perilaku seseorang yang lebih baik dalam mengelola keuangan pribadinya. Literasi keuangan memiliki hubungan yang sebanding dengan manajemen keuangan sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka semakin baik manajemen keuangan yang dilakukan seseorang (Baiq Fitri Arianti & Khoirunnisa Azzahra, 2020). Oleh karena itu, apabila memiliki literasi keuangan yang baik maka seseorang dapat terhindar dari kesulitan keuangan sehingga literasi keuangan memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Kecerdasan dalam keuangan yang dimiliki seseorang dapat terkait dengan beberapa aspek seperti: proses mendapatkan uang, proses mengelola uang, proses menyimpan uang, dan proses menggunakan uang (Baiq Fitri Arianti & Khoirunnisa Azzahra, 2020).

Situasi wajib pajak di kecamatan Iir Timur 1 Kota Palembang Saat ini, ada beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan bisnis di kecamatan Iir Timur 1 Kota Palembang. Salah satu masalah yang menghambat pertumbuhan bisnis adalah kurangnya pengetahuan keuangan para pelaku usaha, termasuk kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang efektif. Terbatasnya ruang lingkup pasar, keterbatasan manajemen finansial, dan keterbatasan teknologi dan informasi. Oleh karena itu para pelaku usaha di wilayah kecamatan Iir Timur 1 Kota Palembang belum bisa mengaplikasikan tata kelola keuangan yang benar dalam kegiatan usahanya. Para pelaku usaha yang berada di wilayah kecamatan Iir Timur 1 Kota Palembang. Pengelolaan finansial menjadi salah satu masalah pelaku usaha di wilayah Kecamatan Iir Timur 1 karena mengabaikan pentingnya Literasi keuangan. Pelaku usaha biasanya memiliki pengetahuan dan informasi yang terbatas tentang literasi finansial. Latar belakang pendidikan mereka juga memengaruhi pengetahuan mereka. Di wilayah Kecamatan Iir Timur 1, Beberapa perusahaan merasa bahwa mereka berjalan dengan baik, tetapi mereka tidak berkembang. Mereka tidak dapat menunjukkan jumlah keuntungan yang mereka peroleh dari waktu ke waktu melainkan dengan harta berwujud, seperti tanah, rumah, dan kendaraan. Sebaliknya, aset kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa ada perbedaan antara keduanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, dimana teori ini berasal dari *Theory*

Reasoned Action (TRA). TPB adalah Keadaan pikiran ketika seseorang tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan (Sustiyo & Hidayat, 2020). TPB memberikan penjelasan tentang bagaimana niat kuat dalam diri seseorang dapat mempengaruhi bagaimana suatu tujuan tercapai (Sudiro & Asandimitra, 2022). Teori ini menggabungkan ilmu sosial dan perilaku untuk menentukan sikap yang akan diambil seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Sudiro & Asandimitra, 2022).

Menurut (Rohyana & Maryana, 2021) Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat terhadap pemerintah sebagai kas negara yang pelaksanaannya didasarkan oleh undang-undang sehingga sifatnya memaksa. Iuran ini tidak akan memberikan timbal balik kepada masyarakat yang membayarkannya. kontribusi tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional dan infrastruktur negara.

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi (Agus Subagiyo, Khikmatul Islah, Ratih Kumala, 2021) seperti dengan menaikkan pajak untuk mengurangi inflasi dan menurunkan pajak untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi dan menurunkan pajak untuk meningkatkan uang beredar dan mengatasi deflasi.

Menurut (Purwono, 2019) pengertian Pajak Pertambahan Nilai merupakan "pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen".

3. METODOLOGI

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)". Tempat penelitian dilaksanakan di kecamatan Iir Timur 1 Kota Palembang, sedangkan waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan November 2023 hingga bulan April 2024, dengan durasi total 6 bulan. Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, yang merupakan formulir dengan pertanyaan terstruktur (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di kecamatan Iir Timur 1 Kota Palembang, berjumlah 68.775 orang. Untuk menentukan sampel, digunakan metode Slovin dengan menggunakan rumus matematis yang telah ditetapkan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang diambil adalah 398 responden dari masyarakat kecamatan Iir Timur 1 Kota Palembang.

Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling, di mana sampel diambil

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kenaikan Tarif PPN (X1), Literasi Pajak (X2), dan Literasi Keuangan (X3), sementara variabel terikatnya adalah Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y). Definisi operasional diberikan untuk membatasi pengertian variabel-variabel yang digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan langkah penting dalam memvalidasi kuesioner sebelum digunakan dalam penelitian. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi antara item-item dalam kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan berbagai teknik statistik, termasuk uji normalitas, uji asumsi klasik (seperti uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), regresi linier berganda, dan uji hipotesis statistik. Setelah data dianalisis, hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah pemahaman. Uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menggunakan tingkat signifikansi yang telah ditentukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 398 masyarakat yang berada di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang diperoleh data jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| Laki-laki | 106 | 26,63 |
| Perempuan | 292 | 73,37 |
| Jumlah | 398 | 100 |

Sumber : Data Diolah (2024)

Dari tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa dari jumlah total 398 masyarakat yang berada di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, terdapat 292 orang (73,37%) responden berjenis kelamin Perempuan dan 106 orang (26,63%) responden berjenis kelamin Laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin Perempuan yang mendominasi masyarakat yang berada di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 398 masyarakat yang berada di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang diperoleh data usia.

Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Responden Berdasarkan Usia

| Jenis Usia | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| 18 - 30 tahun | 80 | 20,10 |
| 31 - 40 tahun | 108 | 27,14 |
| 41 -50 tahun | 198 | 49,75 |
| 51-58 tahun | 12 | 3,02 |
| Jumlah | 398 | 100 |

Sumber : Data Diolah (2024)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari jumlah total 398 responden masyarakat yang berada di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, terdapat 80 orang (20,10%) responden berusia 18 - 30 tahun, 108 orang (27,14%) responden berusia 31 - 40 tahun, 198 orang (49,75%) responden berusia 41 -50 tahun dan 12 orang (3,02%) responden berusia 51-58 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 41-50 tahun.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang akan diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan *Correlation Matrix* dengan membandingkan nilai r hitung (*Correlated Item-Total Correlation*) yang ditemukan dengan nilai r tabel (*Product Moment Pearson*). Pada penelitian ini jumlah sample (n) = 398 dan besarnya df (standar defiasi) dapat dihitung $(n - 2) = 398 - 2 = 396$ dan $\alpha = 0,05$ didapat $r_{tabel} = 0.098$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (diterima) (Ghozali, 2013:53). Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan terhadap kegiatan tabel variabel yaitu variabel kenaikan tarif PPN, literasi pajak, literasi keuangan dan potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Setelah dilakukan pengolahan data lebih lanjut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas kenaikan tarif PPN (X1)

| No Item | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
|---------|--------------|-------------|------------|
| X1.1 | 0,862 | 0.098 | Valid |
| X1.2 | 0,801 | 0.098 | Valid |
| X1.3 | 0,909 | 0.098 | Valid |
| X1.4 | 0,924 | 0.098 | Valid |
| X1.5 | 0,867 | 0.098 | Valid |
| X1.6 | 0,831 | 0.098 | Valid |

Sumber: Data Primer yang Diolah 2024

Dari tabel 3 diatas menunjukkan hasil uji validitas kenaikan tarif PPN (X_1) didapatkan r_{hitung} terendah adalah sebesar 0,801 dan nilai r_{hitung} tertinggi adalah sebesar 0,924. Hasil ini diartikan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel kenaikan tarif PPN (X_1) dinyatakan Valid (diterima) dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat ukur

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Literasi pajak (X_2)

| No Item | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
|---------|--------------|-------------|------------|
| X2.1 | 0,575 | 0.098 | Valid |
| X2.2 | 0,639 | 0.098 | Valid |
| X2.3 | 0,675 | 0.098 | Valid |
| X2.4 | 0,628 | 0.098 | Valid |
| X2.5 | 0,551 | 0.098 | Valid |
| X2.6 | 0,731 | 0.098 | Valid |
| X2.7 | 0,657 | 0.098 | Valid |
| X2.8 | 0,686 | 0.098 | Valid |

Sumber: Data Primer yang Diolah 2024

Dari tabel 4 diatas menunjukkan hasil uji validitas Literasi pajak (X_2) didapatkan r_{hitung} terendah adalah sebesar 0,551 dan nilai r_{hitung} tertinggi adalah sebesar 0,731. Hasil ini diartikan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel Literasi pajak (X_2) dinyatakan Valid (diterima) dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat ukur.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas literasi keuangan (X_3)

| No Item | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
|---------|--------------|-------------|------------|
| X3.1 | 0,823 | 0.098 | Valid |
| X3.2 | 0,733 | 0.098 | Valid |
| X3.3 | 0,798 | 0.098 | Valid |
| X3.4 | 0,810 | 0.098 | Valid |
| X3.5 | 0,802 | 0.098 | Valid |
| X3.6 | 0,795 | 0.098 | Valid |
| X3.7 | 0,858 | 0.098 | Valid |
| X3.8 | 0,785 | 0.098 | Valid |

Data Primer yang Diolah 2024

Dari tabel 5 diatas menunjukkan hasil uji validitas literasi keuangan (X_3) didapatkan r_{hitung} terendah adalah sebesar 0,733 dan nilai r_{hitung} tertinggi adalah sebesar 0,858. Hasil ini diartikan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel literasi keuangan (X_3) dinyatakan Valid (diterima) dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat ukur.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y)

| No Item | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
|---------|--------------|-------------|------------|
| Y.1 | 0,396 | 0.098 | Valid |
| Y.2 | 0,401 | 0.098 | Valid |
| Y.3 | 0,596 | 0.098 | Valid |
| Y.4 | 0,493 | 0.098 | Valid |
| Y.5 | 0,484 | 0.098 | Valid |
| Y.6 | 0,685 | 0.098 | Valid |
| Y.7 | 0,560 | 0.098 | Valid |
| Y.8 | 0,501 | 0.098 | Valid |

Sumber: Data Primer yang Diolah 2024

Dari tabel 6 diatas menunjukkan hasil uji validitas Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) didapatkan r_{hitung} terendah adalah sebesar 0,396 dan nilai r_{hitung} tertinggi adalah sebesar 0,685. Hasil ini diartikan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) dinyatakan Valid (diterima) dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat ukur.

Hasil Uji Reliabilitas

Alat ukur valid selanjutnya adalah reabilitas. Reabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur gejala yang sama instrumen dinyatakan realibel bila *Cronbach Alpha* > 0.6 (Sugiyono, 2018). Makin kecil kesalahan pengukuran, makin reliabel alat pengukur dan sebaliknya. Berapa kesalahan pengukuran dapat diketahui dan nilai korelasi antara hasil pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Bila nilai korelasi (r) dikuadratkan maka hasilnya disebut koefisien determinasi (*Coefficient of Determination*) yang menampakkan petunjuk besar kecil hasil pengukuran yang sebenarnya. Semakin tinggi angka korelasi maka semakin besar nilai koefisien determinasi dan semakin rendah kesalahan pengukuran.

Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach's</i> | Keterangan |
|------------------------------|-------------------|------------|
| | <i>Alpha</i> | Reliabel |
| Kenaikan tarif PPN (X_1) | 0,933 | Reliabel |
| Literasi pajak (X_2) | 0,798 | Reliabel |
| Literasi keuangan (X_3) | 0,918 | Reliabel |
| Potensi (PPN) (Y) | 0,603 | Reliabel |

Data Primer yang Diolah 2024

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil Uji reabilitas dihitung menggunakan rumus koefisien *Alpha Cronbach* dengan bantuan alat Program SPSS Versi 24 yaitu dengan membandingkan koefisien (α) dengan 0,60 dengan ketentuan jika koefisien (α) *Cronbach* $\geq 0,60$ maka dapat dinyatakan reliabel. Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu :

- Kenaikan tarif PPN (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar $0,933 \geq 0,60$ maka variabel Kenaikan tarif PPN dapat dinyatakan reliabel.
- Literasi pajak (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar $0,798 \geq 0,60$ maka variabel Literasi pajak dapat dinyatakan reliabel.
- Literasi keuangan (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar $0,918 \geq 0,60$ maka variabel Literasi keuangan dapat dinyatakan reliabel.
- Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) memiliki nilai koefisien sebesar $0,603 \geq 0,60$ maka variabel Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Data yang berdistribusi normal adalah salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Data yang tidak mempunyai distribusi normal harus menggunakan *non parametric-test*. Dari tabel *One-sample Kolmogorov Smirnov Test* diperoleh angka probabilitas. Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$) dengan syarat pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika nilai signifikan atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal.
- Jika nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal.

Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|--|----------------|-------------------------|
| N | | 398 |
| Normal Parameters** | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.29877388 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .041 |
| | Positive | .041 |
| | Negative | -.028 |
| Test Statistic | | .041 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .108* |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Data Primer yang Diolah 2024

Dari hasil uji Normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* didapatkan hasil signifikansi dari uji Normalitas sebesar 0,105 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Hasil Uji Multikolinieritas

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinieritas adalah sebagai berikut: Jika $VIF > 10$ dan $Tolerance < 0,10$ maka terjadi multikolinieritas, Jika $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | KENAIKAN TARIF PPN | .957 | 1.045 |
| | LITERASI PAJAK | .968 | 1.033 |
| | LITERASI KEUANGAN | .970 | 1.031 |

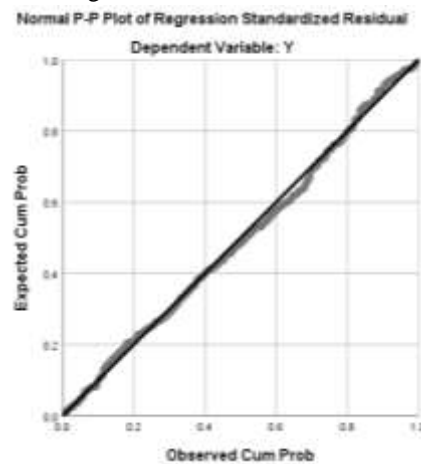
a. Dependent Variable: POTENSI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Sumber : Data Primer yang Diolah 2024

Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel 4.9 hasil uji multikolinieritas, variabel bebas menunjukkan bahwa nilai $VIF = 1.045, 1.033$ dan 1.031 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10, jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pengolahan data SPSS untuk uji heteroskedastisitas dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang Diolah 2024

Berdasarkan Normal P-Plot diatas menjelaskan bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal. maka sesuai dengan grafik yang ada

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 17,915 | 1,335 | | 13,417 | ,000 |
| | KENAIKAN TARIF PPN | ,089 | ,029 | ,149 | 3,107 | ,002 |
| | LITERASI PAJAK | ,283 | ,038 | ,367 | 7,490 | ,000 |
| | LITERASI KEUANGAN | -,042 | ,023 | -,098 | -1,800 | ,075 |

a. Dependent Variable: POTENSI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Sumber : Data Primer yang Diolah 2024

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda diatas dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 17.915 + 0,089 X_1 + 0,283 X_2 - 0,042 X_3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa,

1. Nilai konstanta (a) adalah menunjukkan besarnya Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y). Hal ini menyatakan bahwa jika variabel kenaikan tarif PPN, literasi pajak, literasi keuangan dianggap konstan, maka nilai Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 17.915
2. Koefisien regresi Variabel kenaikan tarif PPN (X₁) sebesar 0,089, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kenaikan tarif PPN mengalami kenaikan satu-satuan, maka Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,089
3. Koefisien regresi variabel literasi pajak (X₂) sebesar 0,283, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan literasi pajak mengalami kenaikan satu-satuan, maka Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,283
4. Koefisien regresi variabel literasi keuangan (X₃) sebesar - 0,042, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan literasi keuangan mengalami kenaikan satu-satuan, maka Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,042.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,364 ^b | ,133 | ,128 | 2,308 | ,774 |

a. Predictors: (Constant), LITERASI KEUANGAN, LITERASI PAJAK, KENAIKAN TARIF PPN
b. Dependent Variable: POTENSI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Sumber : Data Primer yang Diolah 2024

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,126 atau 12,60%. Variabel kenaikan tarif PPN, literasi pajak dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus di kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang) sedangkan sisanya 87,40% berpengaruh dengan faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji apakah kenaikan tarif PPN, literasi pajak dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus di kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang) dengan menggunakan uji f dapat dilihat tabel dibawah ini:

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 321,156 | 3 | 107,052 | 20,100 | ,000 ^b |
| | Residual | 2097,891 | 394 | 5,325 | | |
| | Total | 2419,048 | 397 | | | |

a. Dependent Variable: POTENSI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
b. Predictors: (Constant), LITERASI KEUANGAN, LITERASI PAJAK, KENAIKAN TARIF PPN

Sumber : Data Primer yang Diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.12 terlihat bahwa nilai F sig 0,000 ≤ 0,05, maka variabel kenaikan tarif PPN, literasi pajak dan literasi keuangan mempunyai pengaruh secara simultan dengan variabel potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus di kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang).

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hipotesis yang diuji adalah uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas.

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 17,915 | 1,335 | | 13,417 | ,000 |
| | KENAIKAN TARIF PPN | ,089 | ,029 | ,149 | 3,107 | ,002 |
| | LITERASI PAJAK | ,283 | ,038 | ,367 | 7,490 | ,000 |
| | LITERASI KEUANGAN | -,042 | ,023 | -,098 | -1,800 | ,075 |

a. Dependent Variable: POTENSI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Sumber : Data Primer yang Diolah 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji Parsial (Uji t) pada diatas, diketahui bahwa Variabel kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,089 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 ≤ 0,05, Variabel literasi pajak berpengaruh terhadap

potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,283 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$, Variabel literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,042 dan nilai signifikansi sebesar $0,073 \geq 0,05$.diperoleh nilai $F_{hitung} = 20,105$ yang lebih besar dari nilai $F_{tabel} = 2,41$ dan sig F-test = 0,000 yang dibawah angka 0,05 %. Kesimpulannya adalah ada pengaruh positif signifikan variabel kenaikan tarif PPN, literasi pajak dan varian produk secara simultan terhadap variabel potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus di kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang).

Berdasarkan pada temuan di atas, penyebab berpengaruhnya semua variabel bebas terhadap Potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang adalah Potensi penerimaan PPN ini dapat dilihat melalui keputusan pembelian produk BKP dan/atau JKP yang ditentukan oleh masyarakat sebagai salah satu elemen yang memiliki andil cukup besar pada kehidupan bermasyarakat. Kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan dapat menjadi faktor seseorang dalam menentukan keputusan pembelian yang dimana juga sejalan dengan teori *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang merupakan Sikap atau Perilaku Seseorang untuk dapat memutuskan untuk membeli/menggunakan atau tidak produk BKP

dan/atau JKP berdasarkan sikap terhadap perilaku dan kontrol diri terkait kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Responden penelitian sejumlah 398 masyarakat di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Secara parsial, kenaikan tarif PPN dan literasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di wilayah tersebut.

5.2. Saran

Pemerintah pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subagiyo, Khikmatul Islah, Ratih Kumala, D. H. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8 No. 2(September).
- Baiq Fitri Arianti, & Khoirunnisa Azzahra. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan : Studi Kasus UMKM Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2). <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2635>
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dcriyani, Ni. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, VOL. 4 NO.(2).
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 11(1). <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- Kementerian PPN. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Purwono, H. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak. *Amajon*.
- Rohyana, C., & Maryana, D. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 perusahaan sektor makanan dan minuman di BEI 2015-2019). *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10918>
- Sjahril, R. F., Yasa, I. N. P., & Dewi, G. A. K. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11.
- Sudiro, P. I., & Asandimitra, N. (2022). Pengaruh Financial Literacy, Uang Elektronik, Demografi, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1).
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 5(1). <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>
- Sustiyo, J., & Hidayat, R. T. (2020). LITERASI KEUANGAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA GENERASI Z. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.635>
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2022). PENGARUH TARIF DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP NIAT MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.281>